

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi yaitu sistem politik yang memiliki hubungan erat dengan hukum. Tanpa hukum maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik dan kata lain bisa timbul anarki, selain itu hukum tanpa politik yang demokratis hanya bisa jadi hukum yang represif serta elitis (Mahfud MD dalam Sunarno, 2011: 41).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum dan yang berkuasa yakni rakyat (demokrasi). Hal tersebut tercantum pada pasal 1 ayat (2) serta ayat (3) menyatakan “Kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia merupakan negara hukum.” Alhasil Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraannya.

Menurut Konferensi *The International Commission of Jurist* di Bangkok pada 1965, dikatakan harus ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh *Representative Government Under The Rule of Law* (Negara hukum yang demokratis) adalah (1) Adanya proteksi konstitusional; (2) Terdapat lembaga pengadilan yang bebas serta tidak memihak; (3) Terdapat pemilihan umum yang bebas; (4) Terdapat kebebasan guna menyampaikan pendapat; (5) Terdapat kebebasan berserikat serta menjalankan oposisi; “dan” (6) Terdapat pendidikan *civic* (pendidikan kewarganegaraan) (Toto Pandoyo dalam Sunarno, 2011: 43). Pada poin (3), (4) dan (5) dari syarat tersebut menunjukkan sebuah bentuk kegiatan politik baik dari, oleh

dan untuk masyarakat. Sehingga demokrasi pun erat kaitannya dengan kebebasan berpolitik.

Politik menunjukkan sikap dan perilaku manusia, baik berbentuk aktivitas, kegiatan, maupun sikap, yang memiliki tujuan memengaruhi atau menjaga tatanan kelompok masyarakat dengan memakai kekuasaan. Hal ini dapat dikatakan bukanlah dasar politik, walaupun musti diakui tidak bisa dipisahkan dari politik, disini politik menginginkan supaya kebijaksanaan bisa berjalan pada kehidupan masyarakat (Nambo & Puluwuluwa, 2005: 265). Secara definisi, politik dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan dalam diri politik. (Budiardjo, 2008: 8).

Kegiatan politik yang ada memiliki fungsi-fungsi yang dibagi menjadi fungsi masukan (*input function*) serta fungsi keluaran (*output function*). Fungsi masukan (*input function*) merupakan fungsi penting untuk penentuan cara kerja terutama dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan pada sistem politik (Mas'ood dalam Nambo & Puluwuluwa, 2005: 269-270). Fungsi tersebut diantaranya sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi politik, artikulasi kepentingan, agresi kepentingan dan komunikasi politik. Selain itu fungsi luaran (*output function*) mencakup fungsi-fungsi pembuatan aturan, implementasi aturan serta pengawasan azas pelaksanaan aturan-aturan.

Dalam implementasi kegiatan politik erat kaitannya dengan perilaku dan partisipasi dari pelaku politik. Secara umum Partisipasi politik artinya keikutsertaan pada dunia politik. Hal tersebut menunjuk dalam keikutsertaan masyarakat pada sejumlah proses kegiatan politik. Keterlibatan masyarakat diberbagai tahapan

kebijakan, diawali dari proses penyusunan keputusan hingga penilaian keputusan, disini masyarakat juga memiliki peluang ikut serta dalam pelaksanaan keputusan (Miaz, 2012: 20). Di sini masyarakat atau sekumpulan orang diminta aktif pada kegiatan politik dengan cara memilih pemimpin Negara dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Seluruh kegiatan ini berisi penentuan pilihan, ikut serta kampanye dan anggota politik.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk partisipasi politik yang paling umum ditemui di kehidupan bernegara. Pemilihan Umum (Pemilu) dimaknai sebagai gambar dan parameter dari sebuah demokrasi. Hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan dengan suasana terbuka dengan bebas berpendapat serta kebebasan berserikat, dilihat menggambarkan partisipasi dan aspirasi masyarakat secara akurat. Di Indonesia Pemilihan Umum terdiri atas Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden-Wakil Presiden, Gubernur, Bupati / Wali Kota, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari berbagai jenis Pemilihan Umum tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden serta Wakil Presiden menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia yang dilaksanakan selama lima tahun sekali. Pada tahun 2019, Indonesia mengadakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk ke lima pasca reformasi Indonesia. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Calon yang diusung pada Pemilu 2019 yaitu Paslon Pertama Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin serta Paslon Kedua H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno (BPS Provinsi Jawa tengah, 2019).

Paslon Nomor Urut 1 diusung oleh sepuluh partai yaitu PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, dan Hanura. Partai lain yang mendukung tetapi tidak memiliki kursi di parlemen yaitu PKPI, PSI, Partai Perindo, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Paslon No Urut 2 diusung oleh enam partai politik yaitu Partai Gerindra, PKS, PAN, serta Partai Demokrat. Partai lain yang mendukung tetapi tidak memiliki kursi di parlemen, yaitu Partai Garuda dan Partai Berkarya. Pesta demokrasi ini berlangsung dari akhir tahun 2018 hingga bulan April 2019. Berbagai partisipasi politik pun turut mewarnai dalam menyongsong Pemilihan Umum ini.

Partisipasi politik sangat berpengaruh dalam kegiatan Pemilu terutama legitimasi masyarakat terhadap calon pasangan yang terpilih. Masyarakat mempunyai kepentingan tersendiri dalam mengambil pilihannya di Pemilu. Di sini partisipasi politik pada Pemilu bisa dinilai selaku kontrol masyarakat kepada pemerintah. Pengamatan yang dilakukan beragam tergantung tinggi rendahnya partisipasi politik.

Partisipasi politik selain menjadi landasan demokrasi, keduanya saling bersangkutan dalam pemenuhan hak-hak politik. Hak politik adalah hak dipunyai oleh tiap individu yang diberikan hukum untuk mengambil kedudukan atau kekuasaan yang bermanfaat bagi dirinya (Putra, 2018). Di Indonesia sendiri, hak politik dijamin melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Berdasar pada pasal tersebut dijelaskan bahwa

Negara memberikan hak bagi setiap warganya dalam mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan perpolitikan.

Negara sudah memberi ruang untuk semua warga negara yang ikut serta pada kegiatan Pemerintahan tanpa membedakan gender . Ditinjau dari data DPT Per Provinsi, secara kuantitas pemilih Perempuan lebih besar dengan 50,08% daripada Laki-Laki di angka 49,92% (BPS RI, 2019: 136). Profil perempuan Indonesia sekarang bisa dilihat sebagai manusia yang hidup pada keadaan dilematis (Nimrah dan Sakaria et al., 2015). Keadaan ini berlaku pula dalam penyaluran hak politik yang masih didominasi kaum laki-laki. Selama ini perempuan dalam kegiatan partisipasi politik lebih sering memainkan peran sekunder. Para perempuan hanya dipandang selaku pelengkap, hal ini dikarenakan minimnya wawasan para perempuan dibidang politik (Inwantoro, 2014: 2).

Secara umum partisipasi politik perempuan adalah kegiatan para perempuan dalam kehendak sendiri yang tergabung pada komunitas politik perempuan. Hal ini terdapat ada beberapa unsur, diantaranya aktivis perempuan, kader partai politik perempuan, pemerhati politik dan lain sebagainya (Priandi & Roisah, 2019: 107). Selain kaukus tersebut, terdapat pula salah satu momen yang penting yaitu partisipasi perempuan dalam menyalurkan suaranya dalam Pemilihan Umum. Penyaluran suara di sini memiliki konsep sederhana yang dapat dipahami berbagai sektor masyarakat. Tak hanya perempuan dari kalangan Akademisi saja namun juga Ibu Rumah Tangga.

Di sini penulis tertarik untuk mengangkat topik Ibu Rumah Tangga hal ini dikarenakan Ibu Rumah Tangga juga merupakan segmen terpenting di Pemilihan

Umum (Pemilu) dan Ibu Rumah bisa melakukan kampanye secara terselubung, misalnya dalam forum arisan RT/RW, PKK, forum belanja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ibu Rumah Tangga bisa dikatakan sebagai wanita yang mengatur semua hal pekerjaan rumah tangga (tidak kerja di kantor). Ibu Rumah Tangga yakni seorang wanita yang menjalankan kegiatannya di rumah serta mengisi waktunya guna mengurus anak serta kegiatan bersih-bersih rumah, memasak dan lain sebagainya (Dwijayannti dalam Junaidi, 2017: 78). Pada bahasa lain dipahami jika ibu rumah tangga merupakan wanita yang sebagian besar waktunya dipakai untuk mengajarkan serta memelihara anak anaknya menggunakan pola asuh yang baik serta benar (Kartono, 2011: 18). Para politisi menganggap bahwa ibu rumah tangga merupakan segmen penting dalam Pemilu. Sehingga banyak pergerakan di gerakkan melalui para Ibu Rumah Tangga yang aktif di jejaring komunitas.

Kabupaten Blora yang ada pada perbatasan bagian timur antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Kabupaten Blora terletak di Dapil III bersama Kabupaten Grobogan, Pati dan Rembang. Jumlah DPT keseluruhan sejumlah 706.940 orang dengan persentase Laki-Laki sebanyak 49,37% dan Perempuan 50,63% (BPS Kabupaten Blora, 2019). Jumlah tersebut kemudian ditambah DPT tambahan sejumlah 1.162 orang. Jumlah pengguna hak pilih di Blora sebesar 81,11%. Perolehan suara tertinggi berada di Kecamatan Blora disusul dengan Kecamatan Randu, Kecamatan Cepu, Kecamatan Todanan dan Kecamatan Jepon.

Kecamatan Jepon mendapatkan 40.031 suara atau peringkat kelima dalam lingkup Kabupaten Blora. Kecamatan Jepon terdiri atas 25 Desa dan fokus penelitian ini yaitu di Desa Balong dan Desa Jomblang. Pemilihan Desa Jomblang didasarkan pada jumlah penduduknya yang terdiri atas 3.019 jiwa yang terbagi atas 1.523 Laki-Laki dan 1.496 Perempuan. Desa ini merupakan desa terpadat kelima di Kecamatan Jepon. Kemudian, Desa Balong memiliki jumlah penduduk sejumlah 1.547 jiwa yang terbagi atas 763 Laki-Laki serta 784 Perempuan.

Dua desa ini mempunyai komposisi yang berbeda di mana Desa Jomblang memiliki komposisi penduduk Laki-Laki lebih besar sedangkan Desa Balong memiliki komposisi penduduk Perempuan lebih besar. Selain itu, dua desa tersebut memiliki dominasi Ibu Rumah Tangga sebagai mata penaharian sehari-hari. Dengan fenomena tersebut mengisik penulis untuk menganalisis tentang partisipasi Ibu Rumah Tangga Desa Jomblang dan Desa Balong dalam Pemilihan Umum. Partisipasi politik ini terutama dalam partisipasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan sebuah fenomena yang terjadi dalam proses partisipasi politik di Kabupaten Blora. Sehingga rumusan masalah untuk penelitian ini yakni:

- a. Bagaimana bentuk partisipasi politik oleh Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang dan Desa Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dalam Pilpres tahun 2019?

- b. Bagaimana tahananap partisipasi politik oleh Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang dan Desa Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dalam Pilpres tahun 2019?
- c. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik oleh Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang dan Desa Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dalam Pilpres tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, untuk tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis bentuk partisipasi politik oleh Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang dan Desa Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dalam Pilpres tahun 2019.
- b. Menganalisis tahananap partisipasi politik oleh Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang dan Desa Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dalam Pilpres tahun 2019.
- c. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi partisipasi politik oleh Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang dan Desa Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dalam Pilpres tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi jadi 2 yakni manfaat teoritis serta manfaat praktis. Adapun penjabaran dari manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan Ilmu Pemerintahan terutama dalam fokus penelitian partisipasi politik Ibu Rumah Tangga dalam Pemilihan Umum. Temuan penelitian ini bisa digunakan selaku bahan referensi penelitian terkait baik penelitian tentang partisipasi politik secara Ibu Rumah Tangga atau partisipasi politik di Kecamatan Jepon.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan bahan pertimbangan terhadap lembaga terkait seperti dalam merumuskan kebijakan tentang partisipasi politik di Kecamatan Jepon maupun partisipasi politik kalangan Ibu Rumah Tangga. Sehingga luaran kebijakan dapat didasarkan kondisi sebenarnya di Kecamatan Jepon pada umumnya dan Desa Balong serta Desa Jomblang pada khususnya.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian saat ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya. Keputusan penelitian adalah langkah penulis guna mencari perbandingan serta kemudian mendapatkan inspirasi baru guna penelitian berikutnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Septian Tri Baskoro Adi pada tahun 2019 dengan judul “Partisipasi Politik Waria Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.” Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah setempat ditengah-tengah kelompok waria. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan kaum waria hanya kegiatan pemilihan,

untuk kegiatan partisipasi politik yang lainnya belum maksimal di Pilkada DKI Jakarta 2017. Persamaan penelitian ini yaitu teori yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian, obyek penelitian dan metode penelitian.

Kedua, Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Nia Sarinastiti dan Petty S. Fatimah pada tahun 2019 dengan judul “Edukasi Komunikasi Politik Dalam Menciptakan Kesadaran Dan Minat Pemilih Perempuan.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang memotivasi partisipasi politik serta pemahaman politik yakni menyangkut dialog politik yang dikatakan bisa lebih kohesif jika adalah kelompok pada skala kecil. Di sini KPU dan Timses diminta guna memperhatikan krusialnya edukasi yang sesuai untuk para calon pemilih, khususnya pada hal ini kaum perempuan dengan menghadirkan gambaran yang bisa menunjang visibilitas kandidat. Persamaan penelitian ini yaitu pemilih perempuan. Sedangkan Perbedaannya yakni terletak pada lokasi penelitian serta fokus penelitian.

Ketiga, Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Rizki Priadi serta Kholis Roisah pada tahun 2019 dengan judul “Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum DI Indonesia”. Dalam penelitian ini menemukan jika pada dasarnya gairah kaum perempuan pada dunia politik bila tidak didukung terhadap usaha-usaha dan keputusan yang tambah memacu jumlah keterwakilan bisa berdampak menurun. Untuk upaya-upaya yang dijalankan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia yakni pendidikan politik dari keluarga, mempersiapkan anak perempuan dari sekarang guna mengenal politik, mendorong untuk ikut berorganisasi dan advokasi kepada kaum perempuan untuk pentingnya terlibat pada dunia politik. Persamaan penelitian ini yaitu berupa tingkat partisipasi

perempuan. Perbedaan penelitian ini yaitu lokasi serta fokus penelitian yang berbeda. Adapun kepustakaan penelitian terdahulu itu disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penulis	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	Septian Tri Baskoro Adi (2019) “Partisipasi Politik Waria Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.”	Partisipasi politik waria pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang paling umum adalah kegiatan pemilihan. Bentuk partisipasi politik lainnya kurang maksimal di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.	Perbedaan meliputi lokasi penelitian, obyek penelitian	Persamaan menggunakan teori yang sama
2.	Nia Sarinastiti dan Petty S. Fatimah (2019) “Edukasi Komunikasi Politik Dalam Menciptakan Kesadaran dan Minat Pilih Perempuan”	Dengan terdapatnya sosialisasi dari pemerintah maupun politisi yang menjadi calon pemimpin memberi persepsi yang baik dari adanya informasi yang ada di media sosial.	Perbedaan penelitian ini yaitu terdapat pada objek penelitian serta lokasi penelitian.	Persamaan penelitian ini yaitu memilih perempuan.
3.	Rizki Priandi serta Kholis Roisah (2019) “Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”.	Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan yaitu adanya pendidikan politik, mendorong untuk ikut berorganisasi, sosialisasi terhadap kaum perempuan dari pentingnya terlibat pada dunia politik.	Perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian serta fokus penelitian.	Persamaan penelitian ini yaitu berupa tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan umum.

Sumber: Hasil Analisis, 2021.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis mengambil celah peneliti dimana belum ada penelitian yang menulis tentang partisipasi politik Ibu Rumah Tangga. Pada penelitian sebelumnya, juga tidak menggambarkan aspek politik seperti kekuasaan, sehingga penulis bisa mengisi kekosongan aspek politik tersebut dan berusaha menggambarkan dengan jelas melalui penelitian.

1.5.2 Partisipasi Politik

Semakin luasnya partisipasi politik maka semakin luas juga ciri khas modernisasi politik. Pemerintah dan politik di kalangan masyarakat tradisional biasanya memiliki unsur golongan elit kecil. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson pada bukunya yang berjudul Partisipasi Politik di Negara Berkembang, mengemukakan bahwa partisipasi politik yakni keikutsertaan warga atau masyarakat yang memiliki tujuan penentuan kebijakan. (Huntington dan Nelson, 1984: 4). Guna memahami lingkup partisipasi politik, Huntington serta Nelson menentukan batasan-batasan partisipasi politik pada sejumlah aspek, yakni :

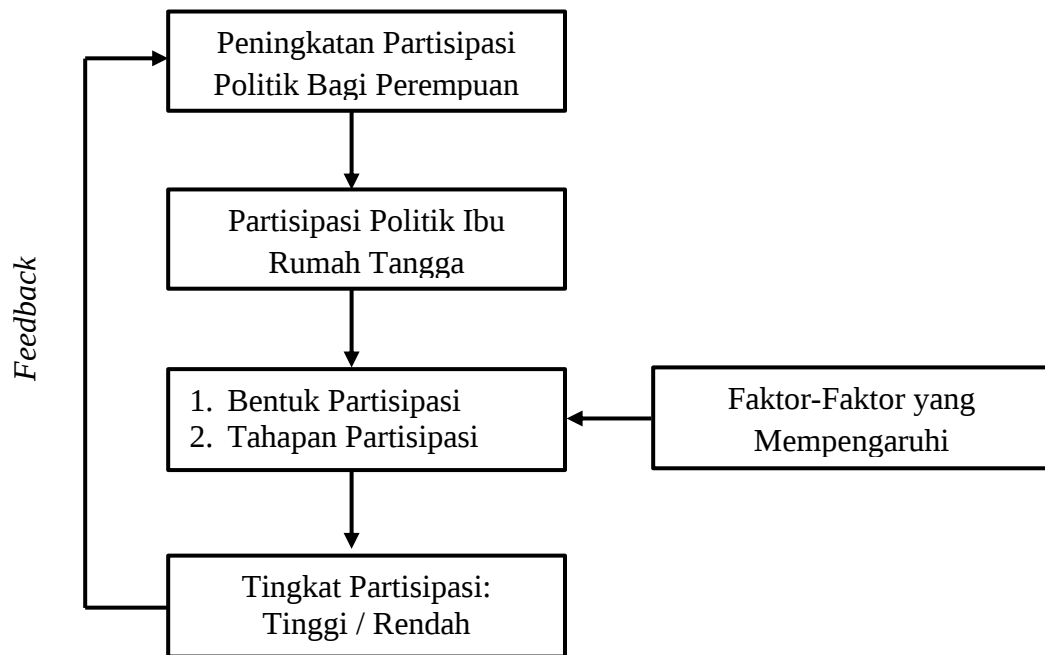
- a. Berisi kegiatan namun tidak melihat sikap. Kegiatan politik yang obyektif serta sikap-sikap politik yang subyektif sebagai variable-variabel yang terpisah atau sama lain.
- b. Kegiatan warga negara preman, atau lebih tepat kembali individu-individu pada peranan mereka selaku warga negara preman. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan antara partisipasi-partisipasi politik serta orang-orang professional dibidang politik.

- c. Kegiatan guna mempengaruhi penentuan kebijakan pemerintah. Tingkat tinggi rendahnya partisipasi politik dikalangan masyarakat dapat dilihat dari cara kerja pemerintah didalam masyarakat daerah tersebut.
- d. Untuk mempengaruhi pemerintah, tidak memperdulikan sisi positif dan negatif pada suatu kegiatan.
- e. Partisipasi politik meliputi partisipasi partisipasi otonom serta partisipasi yang dimobilisasikan. Partisipasi otonom merupakan kegiatan ini dilakukan oleh pelaku sendiri dengan tujuan guna mempengaruhi penentuan kebijakan pemerintah. Sementara itu partisipasi yang dikelola adalah kegiatan politik dari keinginan orang lain.

Dari teori diatas penulis menggunakan teori partisipasi politik Huntington dan Nelson untuk digunakan dalam penelitian tingkat partisipasi politik Ibu Rumah Tangga pada Pilpres 2019.

1.5.3 Kerangka Pikir

Partisipasi pada Pemilihan umum adalah hal yang sangat krusial. Hal ini berdampak dalam hasil dari pemilu itu sendiri. Dalam partisipasi politik yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga memiliki keunikan tersendiri. Stigma Ibu Rumah Tangga yang cenderung di rumah akan menimbulkan keingintahuan bagaimana partisipasi mereka dalam Pemilu 2019. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis fenomena tersebut. Adapun kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Sumber: Hasil Analisis, 2021.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Ramlan Surbakti (2010: 182) mengemukakan partisipasi selaku kegiatan dibedakan jadi partisipasi aktif serta partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan kegiatan meliputi memberikan saran tentang sebuah kebijakan umum, memberikan alternatif kebijakan umum yang tidak sama dengan pemerintah, memberikan kritik serta saran guna memperbaiki kebijakan, membayar pajak serta memilih pemimpin pemerintah, menerima serta menjalankan apa saja setiap kebijakan pemerintah. Sedangkan partisipasi pasif merupakan aktivitas yang mengedepankan proses *output*.

Partisipasi politik dinegara-negara yang menjalankan sistem politik demokrasi adalah hak warga negara, namun pada realitanya presentase warga

negara yang terlibat tidak sama dari satu negara ke negara yang lain. Dengan kata lain, tidak seluruh warga negara terlibat pada proses politik. Faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi tinggi minimnya partisipasi politik individu yakni kesadaran politik serta kepercayaan terhadap pemerintah. Kesadaran politik yang dimaksud adalah kesadaran akan hak serta kewajiban selaku warga negara. Huntington dan Nelson (1984) mengklasifikasikan partisipasi politik dapat menjadi berbagai bentuk, diantaranya :

a. Kegiatan Pemilihan

Berisi memberikan suara, selain itu ada sumbagan-sumbangan guna kampanye, bekerja pada sebuah pemilihan, mencari dukungan untuk seorang calon atau tiap perbuatan yang dimaksudkan mempengaruhi hasil pemilihan.

b. *Lobbying*

Berisi usaha-usaha individu atau kelompok guna menghubungi pejabat-pejabat pemerintah serta pimpinan-pimpinan politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan-kebijakan mereka yang menyangkut kepentingan-kepentingan yang berhubungan banyak orang.

c. Kegiatan Organisasi

Partisipasi selaku anggota atau pejabat pada sebuah perkumpulan yang tujuannya yang pokok serta eksplisit yakni mempengaruhi ketetapan pemerintah.

d. Mencari Koneksi

Tindakan individu yang dimaksudkan kepada pejabat-pejabat pemerintah serta umumnya dengan tujuan mendapat manfaat untuk hanya satu orang atau beberapa orang.

e. Tindak Kekerasan

Salah satu wujud partisipasi politik, disini terdapat usaha dalam penentuan keputusan pemerintah dengan jalan yang akan memunculkan kerugian harta benda dan juga fisik.

Dalam sebuah partisipasi politik terbagi menjadi beberapa tahapan. Miriam Budiardjo (2008) dalam bukunya mengatakan bahwa tahapan partisipasi politik dimulai dari pengambilan

a. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan

Dalam pembangunan partisipasi politik masyarakat maka perlu dibukanya forum, hal ini bertujuan untuk memungkinkan banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi pada proses penentuan keputusan di wilayah setempat.

b. Tahap partisipasi pada perencanaan kegiatan

Ditahap perencanaan akan dilakukan untuk pembuatan keputusan yang berisi maksud, tujuan dan terget. Desain sistem ini harus sesuai dengan respon masyarakat.

c. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan pembangunan musti didefinisikan selaku pemerataan sumbangan masyarakat pada wujud tenaga

kerja, uang tunai, dll yang sesuai terhadap manfaat yang hendak didapat oleh masyarakat tersebut.

d. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan

Bukan saja supaya tujuan bisa diwujudkan seperti yang dikehendaki, namun pula dibutuhkan guna mendapat *feedback* mengenai persoalan serta hambatan yang dialami pada pelaksanaan kegiatan tersebut.

e. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan

Partisipasi pada pemanfaatan hasil kegiatan, merupakan unsur terpenting dalam pembangunan. Tahap ini bisa memunculkan kemauan serta kesukarelaan masyarakat guna senantiasa berpartisipasi pada tiap kegiatan.

Tabel 1.2. Indikator Operasionalisasi Konsep

1.	Bentuk Partisipasi Politik	Kegiatan Pemilihan	• Pemenuhan Syarat Kegiatan Pemilih di Pilpres 2019 • Memberikan Hak Suara dalam Pilpres 2019 • Mengikuti Perkembangan Pilpres 2019 • Memberikan dukungan terhadap Paslon Pilpres 2019
		<i>Lobbying</i>	• Kegiatan Ibu-Ibu dalam menghubungi pejabat Pemerintahan dan Pemimpin Partai Politik
		Keaktifan Organisasi	• Ibu Rumah Tangga mengikuti forum-forum resmi
		Mencari Koneksi	• Ibu Rumah Tangga menjalin hubungan terkait kegiatan-kegiatan politik seperti kampanye, menjadi Timses dll
		Tindak Kekerasan	Ibu Rumah tangga melakukan kekerasan fisik selama kegiatan-kegiatan politik

2.	Tahapan Partisipasi Politik	Pengambilan Keputusan	Ibu Rumah Tangga menjadi pengambil keputusan dalam kegiatan politik (kampanye)
		Perencanaan Kegiatan	Ibu Rumah Tangga turut serta dalam perencanaan kegiatan politik (kampanye)
		Pelaksanaan Kegiatan	Ibu Rumah Tangga mengikuti pelaksanaan kegiatan politik (kampanye)
		Pemantauan dan evaluasi kegiatan	Ibu Rumah Tangga turut serta dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan Pemilu Presiden 2019
		Pemanfaatan hasil kegiatan	Ibu Rumah Tangga menerima dan memanfaatkan hasil dari kegiatan politik (kampanye)

Sumber: Hasil Analisis, 2021.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Metode

Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dalam metode kuantitatif, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari obyek pyang diteliti, dan kemudian dapat membuat instrument untuk mengukurnya. Dalam penelitian kuantitatif, kebenaran itu diluar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, maka peneliti kuantitatif hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data.

Pada umumnya penenlitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Selanjutnya data yang diteliti adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik *probability sampling (random)*.

Berdasarkan data dari sampel tersebut selanjutnya peneliti membuat generalisasi (kesimpulan sampel diberlakukan ke populasi di mana sampel tersebut diambil). Pengkajian kuantitatif dilaksanakan untuk mengetahui kondisi partisipasi Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang dan Desa Balong melalui kuesioner. Kemudian hasil yang didapat dari kuesioner dideskripsikan secara kualitatif untuk mengetahui bentuk-bentuk, tahapan dan faktor yang mempengaruhi partisipasi Politik Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang dan Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian adalah lokasi di mana sebuah penelitian tersebut dijalankan. Pada penelitian ini situs atau lokasi penelitian yakni Desa Jomblang dan Desa Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yakni orang, seseorang atau kelompok yang bisa dimintai informasi berhubungan terhadap penelitian yang dijalankan. Adapun subjek pada penelitian ini diantaranya:

1. Kantor Desa Jomblang Kecamatan Jepon;
2. Kantor Desa Balong Kecamatan Jepon;
3. Ibu Rumah Tangga Desa Jomblang Kecamatan Jepon; dan
4. Ibu Rumah Tangga Desa Balong Kecamatan Jepon.

1.7.4 Jenis Data

Data untuk penelitian ini diperoleh dari kata-kata, pernyataan, serta pemikiran dari subjek penelitian atau informan lewat kuesioner bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang dan Desa Balong. Sedangkan sumber data tertulis diperoleh dari dokumen Kantor Kecamatan Jepon, Kantor Desa Jomblang dan Kantor Desa Balong.

1.7.5 Sumber Data

Penelitian ini memakai sumber yang terdiri dari sumber data primer serta sekunder. Adapun penjabaran sumber data itu adalah:

a. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari informan terkait dengan penelitian. Sumber data primer tentang kondisi partisipasi politik Ibu Rumah Tangga didapat dari kuesioner yang didistribusikan kepada Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang serta Desa Balong Kecamatan Jepon. Kemudian data arsip Pemilu Presiden di Kantor Desa Jomblang dan Kantor Desa Balong Kecamatan Jepon.

b. **Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung yang didapat dengan tidak langsung akan sumber yang berhubungan terhadap penelitian ini. Data sekunder juga bisa melengkapi data primer guna menyempurnakan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah skripsi, jurnal maupun

artikel yang berkaitan dengan partisipasi politik oleh perempuan pada umumnya serta Ibu Rumah Tangga pada khususnya.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai Teknik pengumpulan data yakni secara kuantitatif. Adapun penjabaran Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.7.6.1 Kuantitatif Data

Kuantitatif Data diperoleh dengan memakai kuesioner yang dibagikan kepada Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang dan Desa Balong. Kuesioner merupakan model pengumpulan data yang dijalankan dengan memberi rangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis terhadap responden guna dijawab. Penentuan populasi dan sampel diperlukan sebelum menyebar kuesioner.

a. **Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang tersusun dari objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik khusus yang ditentukan oleh peneliti guna dipelajari serta selanjutnya diambil kesimpulannya. Pada penelitian ini yang jadi populasi yakni Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang dan Desa Balong.

b. **Sampel**

Sampel merupakan aspek dari jumlah serta karakteristik yang dipunyai oleh populasi. Teknik *simple random sampling* dipakai untuk penentuan sampel dalam penelitian ini. Teknik *simple random sampling* yakni penentuan

anggota sampel atas populasi yang dijalankan dengan acak tanpa menilai strata yang terdapat pada populasi tersebut (Sugiyono, 2016: 82). Terdapat 223 Ibu Rumah Tangga di Desa Balong serta 496 Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang. Penentuan jumlah sample penelitian ini memakai Rumus Slovin di bawah ini:

$$n = \frac{N}{1 + N^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

E = Derajat kesalahan

Jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} n &= \frac{\text{Jumlah Ibu Rumah Tangga Desa Jomblang dan Desa Balong}}{1 + \text{Jumlah Ibu Rumah Tangga Desa Jomblang dan Desa Balong} \times 10\%^2} \\ n &= \frac{719}{1 + (719 \times 0,1 \times 0,1)} \\ n &= \frac{719}{1 + 7,19} \\ n &= \frac{719}{8,19} \\ n &= 87,7 \\ n &= 88 \end{aligned}$$

Besaran sampel dalam penelitian adalah 88 sampel responden yang dibagi menjadi 44 responden Warga Desa Balong dan 44 Responden Desa Jomblang.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

1.7.7.1 Kuantitatif Data

Analisis yang digunakan pada kuantitatif data dimasukkan melalui pemeriksaan kelengkapan data kuesioner dahulu sebelum diolah menggunakan

bantuan aplikasi komputer Microsoft Excel dan IBM SPSS Statistic 25 . Hasilnya, data disajikan dalam bentuk tabel.

1.7.8 Kualitas Data

Seluruh data yang telah didapatkan hendak diuji keabsahannya melalui triangulasi. Pada penelitian ini triangulasi dengan sumber diraih menggunakan metode mengkomparasi data hasil studi dokumen (data kualitatif) dengan data hasil kuesioner (data kuantitatif). Data kualitatif dari studi dokumen dari Kantor Desa Jomblang dan Desa Balong dibandingkan dengan data kuantitatif dari hasil kuesioner tanggapan responden yaitu Ibu Rumah Tangga di Desa Jomblang dan Desa Balong.